

Judul : Jangan jadi ketergantungan mahasiswa, penggunaan AI diusulkan dibatasi
Tanggal : Minggu, 14 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jangan Jadi Ketergantungan Mahasiswa Penggunaan AI Diusulkan Dibatasi



Ratih Megasaru Singkarru

ANGGOTA Komisi X DPR Ratih Megasaru Singkarru ingin penggunaan Artificial Intelligence (AI) masuk dalam agenda Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). RUU Sisdiknas bisa mengatur sejauh mana AI bisa dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar atau di dunia pendidikan.

Sebab, kini AI telah jamak digunakan oleh pelajar dan mahasiswa saat membuat tugas sekolah maupun kampus. "Harus ada batasan yang rigid atau tegas dalam penggunaan AI di dunia pendidikan," kata Ratih dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

Ratih melihat para mahasiswa cenderung sangat bergantung dengan AI saat menulis esai. Dikhawatirkan muncul dampak negatif dari ketergantungan secara berlebihan. "Jadi AI seperti pisau bermata dua, di satu sisi membantu, di satu sisi juga destruktif atau merusak," kata politikus Nasdem ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayanti menambahkan, RUU Sisdiknas masih belum selesai dan masih dalam pembahasan. Masyarakat dan pemangku kepentingan masih bisa memberikan masukan

kepada Komisi X DPR, selanjutnya di masa sidang yang akan datang bisa selesaikan.

Esti menargetkan draf yang sudah diperbaiki akan dipaparkan kepada seluruh anggota Komisi X DPR pada akhir September 2025. "Setelah RUU Sisdiknas selesai disusun, naskah akademik tersebut akan diumumkan kepada publik," janjinya.

Terkait ramainya isu hilangnya tunjangan guru dalam RUU Sisdiknas, Esti membantah hal tersebut. Sebab pihaknya belum mengeluarkan drafnya secara resmi. "Ini hal yang sensitif sekali, jika tidak memasukkan soal tunjangan kesejahteraan guru," imbuh politikus PDIP ini.

Komisi X DPR, lanjutnya, telah menggelar rapat membahas hal tersebut dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemendik), Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Kamis (11/9/2025).

Esti lalu menyoroti rendahnya RAPBN 2026 yang diterima Kemendikdasmen, hanya sebesar Rp 55 triliun untuk lebih dari 40 juta siswa. Sedangkan anggaran Sekolah Rakyat sebesar Rp 22 triliun hanya untuk 100 ribu siswa. "Ini anggaran yang kami sebenarnya yang nggak rela amat. Hal ini akan didiskusikan bersama dengan kementerian terkait," kata Esti.

Esti mengingatkan, masih ada anggaran untuk gaji guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan berbagai program lain yang masuk ke dalam pos transfer ke daerah (TKD) yang tidak masuk ke anggaran Rp 55 triliun. ■ TIF